

**PROSES PELAKSANAAN PROGRAM *SOCIAL TRUST FUND* (STF)
DOMPET DHUAFA BAGI KORBAN GEMPA DI LUBUK ALUNG PADANG
PARIAMAN**

MUSFI YENDRA
Universitas Ekasakti Padang

Abstract: The most crucial issue regarding regional autonomy is poverty. Poverty has become sensitive topic to be talked about. The released statistic number of poor citizens will always be associated with the performance of government. The decrease of it considered as an achievement, thus no regional government want the amount of poor citizen increase. Eradicating poverty by showing decrease in the amount of poor citizens annually are stated as national consensus by the center government. One situation that can't never be predicted by government is natural disaster. Recently some of regions in Indonesia are highly susceptible to natural disasters. Natural disaster is one of the main cause of temporary poverty. Government efforts in decreasing the number of poor citizens are always threatened by natural disaster, moreover if it happened in big scale. The damage that cause by natural disaster destroy any resources and efforts of eradicating poverty by the government. Non Government Organization (NGO) exist to help government in facing the impact of natural disaster. Dompot Dhuafa is one of the NGO that help government of Padang Pariaman when earthquake happened at 30th September 2009, by establishing economic empowerment program called Social Trust Fund (STF). The purpose of this research is to describe the process of the implementation of STF to the victim of earthquake who threatened to be poor. Using qualitative method the research is carried at Dompot Dhuafa unit office of STF economic empowerment program at Lubuk alung, Padang Pariaman. The research found a fact that the victim of the earthquake are not only physically and psychologically suffered, but also threatened to be on poverty. Losing their jobs and economical resources are also unavoidable. Meanwhile government only focused on fixing public facilities and infrastructure, missed to allocate budget to help funding citizen. Using qardhul hasan system in empowering, STF proved to be able to help the citizen to rebuild their economic resources. The process of the implementation of this program consist of three steps; establishing, operating and asset reform. The research suggest that in the future government should allocate budget to help funding the citizen, especially to those in the regions that highly susceptible to natural disaster. Involvement of NGO in handling the impact of natural disaster is essential to be on long term.

Keywords: Implementation, STF Program, Dompot Dhuafa.

Abstrak: Masalah yang paling krusial terkait otonomi daerah adalah kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi topik sensitif untuk dibicarakan. Statistik jumlah warga miskin yang dirilis akan selalu dikaitkan dengan kinerja pemerintah. Penurunan itu dianggap sebagai suatu prestasi, sehingga tidak ada pemerintah daerah yang ingin jumlah warga miskin bertambah. Memberantas kemiskinan dengan menunjukkan penurunan jumlah warga miskin secara tahunan dinyatakan sebagai konsensus nasional oleh pemerintah pusat. Satu situasi yang tidak pernah bisa diprediksi oleh pemerintah adalah bencana alam. Baru-baru ini beberapa daerah di Indonesia sangat rentan terhadap bencana alam. Bencana alam adalah salah satu penyebab utama kemiskinan sementara. Upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah warga miskin selalu terancam

oleh bencana alam, apalagi jika itu terjadi dalam skala besar. Kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam menghancurkan setiap sumber daya dan upaya pemberantasan kemiskinan oleh pemerintah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hadir untuk membantu pemerintah dalam menghadapi dampak bencana alam. Dompot Dhuafa adalah salah satu LSM yang membantu pemerintah Padang Pariaman ketika gempa bumi terjadi pada 30 September 2009, dengan mendirikan program pemberdayaan ekonomi yang disebut Dana Perwalian Sosial (STF). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses penerapan STF kepada korban gempa yang diperlakukan menjadi miskin. Menggunakan metode kualitatif penelitian dilakukan di unit kantor Dompot Dhuafa program pemberdayaan ekonomi STF di Lubuk alung, Padang Pariaman. Penelitian ini menemukan fakta bahwa korban gempa tidak hanya menderita secara fisik dan psikologis, tetapi juga terancam kemiskinan. Kehilangan pekerjaan dan sumber daya ekonomi mereka juga tidak terhindarkan. Sementara itu pemerintah hanya fokus memperbaiki fasilitas dan infrastruktur publik, tidak mengalokasikan anggaran untuk membantu pendanaan warga negara. Menggunakan sistem qardhul hasan dalam pemberdayaan, STF terbukti mampu membantu warga untuk membangun kembali sumber daya ekonomi mereka. Proses implementasi program ini terdiri dari tiga langkah; membangun, mengoperasikan dan mereformasi aset. Penelitian ini menunjukkan bahwa di masa depan pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk membantu mendanai warga negara, terutama bagi mereka di daerah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Keterlibatan LSM dalam menangani dampak bencana alam sangat penting untuk jangka panjang.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Program STF, Dompot Dhuafa.

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan persoalan paling rumit yang dihadapi berbagai negara di dunia. Kemiskinan termasuk malapetaka sosial. Bahayanya melebihi malapetaka yang lain seperti penyakit dan kebodohan. Kemiskinan menjadi unsur vital terjadinya penderitaan berbagai bangsa. Kemiskinan menyebabkan munculnya banyak permasalahan, mengantarkan pada terjadinya sejumlah kriminalitas, mendorong terjadinya kerusakan, penyimpangan, pengangguran, dan sebagainya. Saat ini, dunia didera kemiskinan yang menyebar luas di sebagian besar negeri, jika tidak dikatakan seluruhnya, meski berbeda-beda tingkatan dan jumlah orang miskinnya. Hampir-hampir tidak ada satu negara pun yang terbebas dari masalah kemiskinan pada masa sekarang ini, termasuk negara-negara kaya dan maju di bidang *sains* dan industri. Kemiskinan merupakan masalah umum dan telah menjadi bencana.

Di Indonesia kemiskinan menjadi salah satu fokus yang dihadapi oleh pemerintah, baik secara nasional maupun lokal. Kemiskinan akan bisa menyebabkan munculnya persoalan lain di tengah masyarakat seperti tindak kriminal, kebodohan, penyakit dan bahkan penjajahan dari bangsa lain. Kemiskinan sebenarnya tidak hanya menyangkut aspek ekonomi saja, tetapi juga menyangkut aspek lain, seperti aspek kesehatan, pendidikan, sosial dan psikologis, namun kemiskinan dan ekonomi mempunyai kaitan yang sangat erat. Hubungan yang erat juga terjadi antara kemiskinan dan masalah pangan. Penduduk miskin biasanya diukur dari banyaknya penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan. Satu hal yang termasuk membuat kemiskinan tercepat adalah bencana alam. Kondisi yang tak diinginkan ini tentu juga membuat pusing kepala daerah dalam menghadapinya. Tak bisa dipungkiri, bahwa ketika bencana terjadi semua rencana pemerintah daerah bisa berubah. Apalagi bencana itu dalam skala yang besar. Bencana alam di beberapa daerah yang silih

berganti membuat penurunan angka kemiskinan lambat. Pasalnya, banyak masyarakat yang tiba-tiba menjadi miskin akibat kehilangan harta bencanya paska bencana alam.

Peran lembaga masyarakat di negara berkembang sangat dibutuhkan ketika persoalan-persoalan masyarakat belum dapat diatasi secara baik. Kehadiran lembaga masyarakat itu menjadi pelengkap negara dalam mengatasi persoalan-persoalan masyarakat yang seharusnya diselesaikan. Tanpa dasar konstitusi, mereka mengerjakan sebagaimana yang dilakukan oleh negara. Di Indonesia, agama dan budaya menjadi energi yang mendorong hadirnya peran lembaga masyarakat tersebut. Kemiskinan selain *concern* pemerintah dalam menanggulangnya, juga menjadi perhatian serius oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut Hikam (1999) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebut dengan nama lain *Non Government Organization* (NGO) atau organisasi non pemerintah (Ornop) dewasa ini keberadaannya sangat mewarnai kehidupan politik di Indonesia.

Dompot Dhuafa sebagai lembaga swadaya masyarakat nasional juga terlibat aktif dalam penanganan bencana gempa 30 September 2009. Padang Pariaman merupakan daerah terparah saat gempa itu terjadi. Sehingga Dompot Dhuafa mendirikan posko dan membuat berbagai program di daerah ini. Mulai dari tanggap darurat atau emergency, recovery dan rehabilitasi. Pada kondisi tanggap darurat atau emergency, Dompot Dhuafa membuka dapur umum, posko pengungsian, penanganan medis. Saat *recovery* program yang dilakukan adalah *trauma healing*, sekolah darurat, membangun hunian sementara dengan jumlah 1006 unit, mesjid darurat dan pelayanan kesehatan penyandang cacat, jompo serta ibu hamil. Pada saat rehabilitasi dan rekonstruksi Dompot Dhuafa juga membuat berbagai program diantara membangun fisik sekolah dan mesjid yang hancur akibat gempa. Program ini didanai dari CSR berbagai perusahaan. Kemudian Dompot Dhuafa juga menyiapkan program ekonomi. Program tersebut disebut dengan *Social Trust Fund* (STF). Sebagian besar program yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa dipusatkan di Kabupaten Padang Pariaman. Sebab kabupaten merupakan pusat gempa dan paling banyak menderita kerugian.

B. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Agar penelitian ini makin terarah maka peneliti menggunakan kualitatif deskriptif yaitu membuat suatu gambaran mengenai situasi dan kejadian sebagaimana mestinya. Sedangkan Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah mendeskripsikan kondisi yang terjadi saat penelitian, dengan kata lain untuk memperoleh informasi tanpa pengujian hipotesa (Mardalis, 2006). Deskripsi atau narasi tertulis sangat penting dalam pendekatan kualitatif, baik dalam pencatatan data maupun untuk penyebaran hasil penelitian (Danim, 2002). Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif, karena beranjak dari asumsi dasar bahwa dengan menggunakan tipe ini peneliti akan dapat menggambarkan secara lebih mendalam tentang peran Dompot Dhuafa dalam pengentasan kemiskinan pasca bencana gempa di Padang Pariaman.

C. Hasil dan Pembahasan

Profil Dompot Dhuafa

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republik Indonesia didirikan. Empat orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo. Sejak itu, Erie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan,

dan pendidikan bagi kalangan dhuafa. Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.

Kondisi Padang Padang Pariaman Pasca Gempa

Menurut Indikator Kesejahteraan Sumatera Barat yang dipublikasikan oleh tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan bahwa garis kemiskinan per kapita per bulan pada tahun 2009 Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar Rp. 231.533,-. Dengan menggunakan data Susenas bulan Juli tahun 2009 Kabupaten Padang Pariaman, jumlah observasi sebanyak 2.837 jiwa, 640 kepala keluarga dan 17 Kecamatan sampel sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2009 menurut BPS sebesar 392.941 jiwa. Pasca gempa 30 September 2009 warga miskin di Sumatera Barat meningkat hingga 10,8% pada tahun tersebut. Angka ini meningkat 1,5% dibanding proyeksi tahun sebelumnya yang hanya 9,3%. Peningkatan kemiskinan tersebut disebutkan diakibatkan dua faktor; pertama, pertumbuhan ekonomi per kapita yang lebih rendah setelah adanya gempa ditambah dengan naiknya biaya hidup rumah tangga. kedua, warga kehilangan pekerjaan karena gempa (Ali Mukhni, 2012).

Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman. Gempa 30 September 2009 juga meningkatkan jumlah penduduk miskin. Peningkatan penduduk miskin ini jelas punya korelasi dengan kehilangan mata pencaharian dan penurunan pendapatan. Total seluruh kerusakan yang diakibatkan gempa tersebut sekitar Rp8,6 triliun meliputi kerusakan rumah penduduk, infrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi dan beberapa sektor lainnya. Belum lagi dampak mental dan kesehatan yang menimpa penduduknya seperti trauma, depresi dan berbagai penyakit. Akibat gempa 30 September 2009, beberapa pasar yang tersebar di Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana banyaknya bangunan lain, juga ikut runtuh. Data resmi pemerintah daerah Padang Pariaman sendiri mencatat bahwa terdapat 13 pasar besar yang rusak. Kerusakannya pun cukup bervariasi. Mulai dari roboh seluruhnya, rusak berat, sedang hingga rusak ringan.

Sedangkan jumlah pasar nagari atau pasar tradisional yang rusak adalah sebanyak 22 pasar dengan jumlah kerusakan pada kios sebanyak 235 petak dan 14 petak los. Menurut catatan, kerusakan sejumlah tradisional di Padang Pariaman memang umumnya terjadi pada sejumlah kios, los, atap, tempat parkir dan kantor pasar. Di kalangan petani, kehilangan pekerjaan juga terjadi karena kerusakan lahan pertanian akibat longsor atau rusaknya irigasi pertanian. Sementara, dengan tidak bisa bekerja lagi berimbas pada penurunan drastis penghasilan atau pendapatan. Pemerintah kabupaten Padang Pariaman dengan segala kemampuannya terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat gempa 30 September 2009. Pasca gempa secara bertahap juga pemerintah kabupaten Padang Pariaman mulai melakukan berbagai upaya yang setidaknya mampu memberikan dampak positif bagi daerah ini. (Tiga Tahun Padang Pariaman Pasca Gempa 30 September 2009, 2013).

Program Pemberdayaan Ekonomi Social Trust Fund (STF)

Program STF memiliki visi yaitu terwujudnya pengelolaan program yang membantu percepatan bagi pemulihan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya lokal sehingga dapat mengatasi persoalan pengangguran, kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan primer masyarakat di wilayah bencana, terutama bagi masyarakat korban bencana, secara transparan dan berkelanjutan serta memberi *multiplier effect*". Program STF ini dilaksanakan untuk dua tahun pelaksanaan dengan target secara umum sebagai berikut; pola pembiayaan program STF dibagi kedalam dua tahap : tahap ke-1 (pada tahun pertama) menggunakan skim/akad *qardul hasan* (pembiayaan kebajikan) dan tahap ke-2 (pada tahun kedua) menggunakan skim/akad *murabahah* (dana produktif).

Pembiayaan dengan pola *qardul hasan* ini telah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan mikro. Penerima pada pembiayaan tersebut adalah para pelaku usaha mikro. Beberapa penelitian mengenai implementasi pembiayaan *qardul hasan* juga menunjukkan hasil yang berdampak positif bagi masyarakat. Yang membedakan pembiayaan *qardul hasan* dengan perbankan atau pemerintah adalah; pertama, sumber dana. Pembiayaan *qardul hasan* berasal dari dana sosial masyarakat yang diperoleh dari zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) atau CSR perusahaan. Kedua, sistem pinjaman. Pembiayaan *qardul hasan*, ketika seseorang meminjam Rp 1.000.000 maka ia pun akan mengembalikan tepat Rp 1.000.000. Ketiga, rantai penyaluran dana. Distribusi penyaluran pun relatif mudah dilakukan, tidak masalah jika penyaluran dana dilakukan di daerah lain.

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara pemberi pinjaman (dalam hal ini STF) dengan penerima. STF membeli barang yang diperlukan penerima manfaat kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara STF dan penerima. Dalam akad *murabahah* ini penerima manfaat dikenakan pembiayaan dengan tambahan *margin* yang tidak memberatkan dan disepakati bersama. Program STF Padang Pariaman ini dapat terlaksana berkat dukungan pendanaan oleh donatur Dompot Dhuafa non zakat, baik berupa dana infak terikat maupun tidak terikat, Diantaranya adalah CSR PT Tiara Marga Trakindo sebesar Rp. 220.000.000, Hypermart sebesar Rp. 50.000.000. dan kebencanaan/kemanusiaan dari masyarakat umum sebesar Rp 271.760.000. Sampai September 2011 dana yang telah dikeluarkan adalah Rp579,3 juta. Dikucurkan kepada unit STF adalah sebesar Rp541,76 juta yang dialokasikan untuk dana bantuan langsung masyarakat dalam bentuk pembiayaan kebajikan dan biaya operasional program.

Pelaksanaan dan Perkembangan Program STF

Pada tahun 2010 sumber dana yang dikucurkan langsung pada unit STF Padang Pariaman sebesar Rp. 541,760.000,- dikurangi biaya operasional program sebesar Rp. 123.808.648, maka dana yang dapat digunakan untuk pinjaman modal usaha mikro dengan konsep dana bergulir adalah sebesar Rp. 417.951.352,-. Biaya operasional unit STF Padang Pariaman pada tahun awal ini meliputi: persiapan pendirian, pra operasional, sewa tempat selama tiga tahun, biaya renovasi kantor, biaya gaji tiga orang pengelola, inventaris, transportasi, alat tulis kantor dan biaya umum lainnya. Pinjaman tahap ke-1 diberikan dengan plafon sebesar Rp. 1.000.000,- dengan pembayaran angsuran mingguan dalam jangka waktu maksimal 10 bulan. Pinjaman ini menggunakan akad *qardul hasan* (pinjaman kebajikan) yaitu pinjaman dengan pengembalian pokok saja tanpa ada kelebihan.

Penyaluran pinjaman modal usaha ini diberikan secara bertahap per kelompok tiap bulannya. Pada bulan Januari 2010 pinjaman modal usaha diberikan kepada kelompok 1-4, dengan total sebanyak Rp. 40.000.000,-, kemudian dilanjutkan di bulan Februari pinjaman diberikan kepada kelompok 5-8 dengan total sebanyak Rp. 40.000.000,- dan bergulir seterusnya hingga mencapai 61 Kelompok dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 554KK. Pengumpulan dana angsuran secara kolektif berkelompok juga menjadi faktor lancarnya pembayaran angsuran mingguan pinjaman dana, selain memudahkan kelompok-kelompok yang dibentuk berdasarkan wilayah tinggal ini juga menjadi media untuk saling mengingatkan.

Pada tahun kedua ini sumber dana yang dikucurkan langsung pada unit STF Padang Pariaman di awal tahun adalah sebesar Rp. 541,760.000,- yang jika dikurangi biaya operasional program sebesar Rp 158.757.360, maka dana yang dapat digunakan untuk pinjaman modal usaha mikro dengan konsep dana bergulir adalah sebesar Rp. 383.002.640,-. Pertambahan biaya operasional program seiring dengan bertambahnya penerima manfaat juga semakin besar. Kenaikan operasional ini juga terkait dengan kenaikan gaji pengelola tiap bulan, serta kontrak kantor baru dan penambahan aset kantor. Hingga Desember 2011 penyaluran dana program tahap ke-1 masih berjalan hampir separuhnya (49%) dari jumlah penerima manfaat. Adapun penyaluran dana program tahap ke-2 dengan plafon Rp. 2.000.000,- berjumlah 51% dari penerima manfaat. Terdapat juga dua orang penerima khusus dengan plafon Rp 5 juta dan Rp 7 juta. Keduanya mendapat pengecualiaan besaran pinjaman karena jenis usaha yang cukup besar yaitu di bidang industri dan akadnya adalah *murabahah* (jual beli).

Selain fokus membina penerima manfaat yang telah terdaftar sejak tahun pertama, di tahun kedua ini unit STF Padang Pariaman juga memberikan pinjaman kepada penerima manfaat baru. Diantara 277 KK penerima manfaat tahun kedua terdapat 31 KK penerima manfaat baru. Dengan demikian selama dua tahun berjalan, unit STF Padang Pariaman memiliki penerima manfaat sebanyak 585 KK. Tidak dapat dihindari, dalam perjalanannya terdapat penerima manfaat yang lalai dalam pembayaran angsuran mingguan pinjaman, baik karena kurang amanah ataupun karena usaha yang berjalan kurang lancar. Namun hal ini masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jumlahnya sekitar 18 persen. Seperti pada tahun pertama, ditahun kedua ini dengan penyebaran wilayah tinggal yang sama seperti tahun pertama, penerima manfaat unit STF Padang Pariaman juga lebih banyak berprofesi sebagai pedagang.

Dalam tahun kedua ini unit STF Padang Pariaman mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terlihat dari tabel berikut terdapat gambaran pertumbuhan unit STF Padang Pariaman dari segi penerima manfaat dan akumulasi dana bergulir. Disamping aktivitas penyaluran dana modal usaha mikro yang terus berjalan pada hingga tahun kedua, pada bulan September 2011 unit STF Padang Pariaman sudah memulai persiapan-persiapan untuk *asset reform* yaitu berbentuk pendirian lembaga ekonomi kerakyatan berupa Koperasi Serba Usaha (KSU). Setelah melakukan rapat pendirian koperasi pada 18 September 2011, selanjutnya pada tanggal 27 November 2011, KSU disahkan pendiriannya dan memperoleh status badan hukum dengan nama Koperasi STF Baladil Amiin. Dengan nomor akta: 01/KSU STF/XI/2011.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: Program STF Dompot Dhuafa di Padang Pariaman kelahirannya dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat korban bencana gempa 30 September 2009 yang menghadapi kondisi kerentanan miskin. Program STF menggunakan sistem pembiayaan tanpa

bunga (qardhul hasan). Sistem pembiayaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat korban bencana yang memulai kembali usahanya, karena pengembalian dalam jangka waktu yang cukup panjang (10 bulan). Pengembalian dilakukan dengan tujuan untuk digulirkan kembali kepada kelompok baru atau kelompok lama dalam jumlah pembiayaan yang lebih besar. Program STF Dompot Dhuafa sangat membantu masyarakat korban gempa 30 September 2009 di Padang Pariaman, baik bagi yang memulai usaha baru, melanjutkan kembali usaha atau mengembangkan usaha pasca gempa terjadi. Pada tahun 2010 mampu membantu 554 orang dan pada tahun 2011 dengan perguliran pembiayaan membantu 585 orang penerima manfaat.

Daftar Pustaka

- Affandi, Weri Nova. 2009. Identifikasi Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Padang Pariaman (Studi Kasus Nagari Malay V Suku). Jurnal Prodi Perencanaan Pembangunan Program Pascasarjana, Universitas Andalas. Padang.
- Afrizal. 2005. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif : Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan*. Laboratorium Sosiologi FISIP Unand. Padang
- Bungin, Burhann. 2002. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Raja Grafindo.
- BPS Jakarta. Data dan Informasi Kemiskinan 2002 dan 2003.
- Danim, Sudarwan. 2003. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Harahap, Effan Zulfikar. 2011. *Otonomi Daerah Dan Kemiskinan*.
- Iida, Laode. 2000. *Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal*. Lokakarya Membangun Otonomi. Makalah
- Karsidi, Ravik. 1999. *Kajian Keberhasilan Transformasi Pekerjaan Dari Petani Ke Industri Kecil*. Disertasi Doktor IPB, Bogor.
- Karsidi, Ravik. 2001. *Peran Sosial LSM Dalam Era Otonomi Daerah*. Makalah Disampaikan dalam Seminar Peran LSM dalam Otonomi Daerah dan Accountability LSM terhadap Rakyat LBPH-YBKS dan PLSGG-FISIP UNS Solo
- Kartasasmita, Ginanjar. *Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES, Jakarta. 1996.
- Mahasin, Aswab. 2000. *Menyemai Kultur Demokrasi*. LP3ES. Jakarta
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Bandung
- Mas'ud, Said. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. UMM Pres. Malang.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah- Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. LP3ES. Jakarta
- Randy W, Wrihatnolo. *Pemberdayaan; Sebuah Pengantar untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Gramedia. 2007
- Rochman, Meuthia Ganie dkk. 2002. *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*. LP3ES. Jakarta
- Suripto, Agus Surya. 2005. *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Membangun Kesejahteraan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*. Tesis. UMS.
- Syaukani. 2004. *Otonomi Daerah Demi Kesejahteraan Rakyat*. Nuansa Madani, Jakarta
- Suyanto, Bagong. 2011. *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik.

- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pelajar Pustaka. Yogyakarta. 2004
- Wahyuddin, Sumpono. *Perencanaan Terpadu, Perencanaan Berbasis Masyarakat*. CRS. 2004
- Yusrizal, Muhammad. "Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kasus Yayasan Dompot Dhuafa Republika. Tesis. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2002
- Yustika, Ahmad Erani. 2003. *Negara vs Kaum Miskin*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.